

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)**

Oleh :

Rizka Aulia Putri

Pembimbing : Restu Agusti dan Sem Paulus

Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : rizkaauliaputri95@yahoo.com

The influence of competence government officials , accounting control , the reporting system , clarity the budget and observance of legislation over the accountability performance government agencies (Empirical Study on TheRegional Work Units Kampar)

ABSTRACT

This research aims to analyze and gets empirical prove of competence government officials , accounting control , the reporting system , clarity the budget and observance of legislation over the accountability performance government agencies. Population of this research was Working Units (SKPD) at Kampar. Respondents in this study is the structural officials involved in drafting the budget. In total of 33 SKPD will be given three questionnaires, so the number of questionnaires distributed is 76 pieces. The data used are primary data. Data Collection Techniques of field research and literature. The analytical method used in this research is multiple regression analysis. The results prove that Adherence to Government Regulations no significant effect on performance accountability of government agencies, this is indicated from its significance value more than 0.05. While competence government officials , accounting control , the reporting system , clarity the budget has a significant effect on on performance accountability of government agencies by 0.005.

Keywords :Competence, Management Accounting, Reporting Systems, Clarity Goal, Obedience, Accountability

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap daerah berbeda-beda. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan nonkeuangan (BPKP, 2002).

Sedangkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Kompetensi aparatur pemerintah termasuk elemen penting dalam terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik. Standar kompetensi adalah spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan atau ditetapkan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik.

Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Tujuan informasi akuntansi untuk pemakainya adalah meningkatkan penilaian dan keputusan dengan lebih baik (Darma, 2004).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2002) berpendapat, agar laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan pemerintah daerah lebih akuntabel, maka sebaiknya diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan tersebut

Dalam proses penyusunan anggaran, sasaran anggaran yang

ditetapkan juga harus diperhatikan. Sasaran anggaran harus ditetapkan secara jelas dan spesifik agar dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Kurangnya kejelasan sasaran anggaran mengarah pada kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana yang berakibat pada penurunan kinerja.

Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Ketaatan pada peraturan perundangan pun menjadi pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparansi dan aturan hukum yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibu-tuhkan suatu mekanisme dan per-aturan yang jelas (MODUL 1 LAN dalam Saputra, 2010).

Pada penelitian ini mengam-bil objek pada satuan kerja perang-kat daerah kabupaten Kampar. Adapun masalah yang berkaitan dengan kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah kabu-paten Kampar adalah masih belum baiknya hasil kinerja pemerintah kota Pekanbaru, hal ini ditunjukkan dengan hasil audit BPK RI yang memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pekanbaru pada tahun 2014.

Penelitian ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari penelitian Eko Setiawan (2013) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada SKPDkab Pelalawan, dengan menambahkan Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah dari penelitian Maulizka (2015) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut : 1) Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? 2) Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (AKIP)? 3) Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (AKIP)? 4) Apakah Kejelasan Sasaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (AKIP)? 5) Apakah Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?

Adapun tujuan dari penelitian inidiantaranya adalah: 1) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 2) Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP). 3) Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 4) Pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 5) Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Adapun bentuk perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yaitu dikeluarkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kega-galan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Kompetensi Aparatur Pemerintah

Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif. Sesuai dalam prinsip Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kedua yaitu berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif (Muins, 2000 : 40).

Dengan memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi, apabila kompetensi pada instansi

pemerintah itu baik, maka juga akan berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uraian teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Hery, 2009).

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi dapat mempermudah perencanaan dan pengawasan kegiatan dan kinerja organisasi. Sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Berdasarkan uraian teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010). Berdasarkan uraian teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauhmana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik,

jelas, dan dapat dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi.

Namun sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Berdasarkan uraian teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Solihin (2007) mengemukakan bahwa untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Akuntansi dan kaitannya dengan hukum ini telah dikemukakan

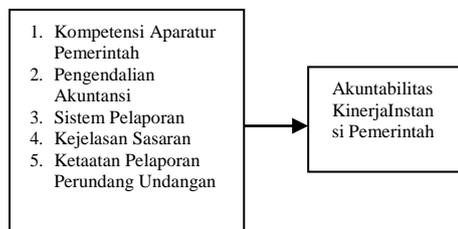
oleh Choi dalam pandangannya mengenai akuntansi dengan lingkungannya. Menurutnya terdapat delapan elemen lingkungan yang mempengaruhi akuntansi yaitu sistem akuntansi, sumber pendanaan, perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Berdasarkan uraian teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris yang telah diuraikan, maka model penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber : Data Olahan 2016

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah instansi-instansi wajib LAKIP Pemerintah Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Alasan dipilihnya populasi penelitian tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang telah mampu melaksanakan penilaian kinerja

organisasi publik (sesuai dengan Kepmendagri 29/2002 yang saat ini di perbaharui dengan PP 58/2005).

Sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan, Bendahara dan Kepala Staf Program Instansi Pemerintah. Alasan pemilihan sampel tersebut adalah karyawan/pegawai yang menjabat posisi tersebut merupakan pimpinan dari setiap unit yg dia pimpin, sehingga mampu untuk menggambarkan kinerja dari tiap-tiap unit SKPD dan dapat mempre-sentasikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar secara keseluruhan.

Jenis data penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data adalah data Primer yang diperoleh dari jawaban atas kuisisioner yang dibagi-kan kepada responden yang diantar sendiri oleh peneliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner berisi pernyataan datau pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang menggunakan lima skala Likert. Sebagai berikut : 5= Sangat Setuju, 4= Tidak Setuju, 3= Netral, 2= Tidak Setuju, 1= Sangat Tidak Setuju. Kuesioner pada penelitian ditujukan kepada pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, dan pejabat pelaksana anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Metode Analisis Data Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut.

Definisi Operasional Penelitian dan Variabel Penelitian

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Menurut Bastian (2006) variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur melalui dua indikator yaitu perencanaan strategik yang terdiri dari tujuan perencanaan dan sasaran strategik dan indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*).

Kompetensi Aparatur Pemerintah (X₁)

Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu Memiliki keahlian dibidangnya, memiliki pengetahuan tentang pemerintahan, memiliki rasa tanggungjawab (Oktrianda, 2010).

Pengendalian Akuntansi (X₂)

Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan delapan indikator variable, yaitu pusat kegiatan, ruang lingkup, maksud, sifat struktur, sifat informasi, orang yang terlibat, sumber ilmu, dan lingkup waktu (Herawaty, 2011).

Sistem Pelaporan (X₃)

Variabel sistem pelaporan diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu Laporan merinci varian-varian prestasi aktual berdasarkan faktor-faktor penyebabnya dari unit organisasi, laporan mencakup ramalan tahunan, laporan mencantumkan penjelasan mengenai, yaitu penyebab variansi (penyimpangan), tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan, dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi/perbaikan bisa efektif (Herawaty, 2011).

Kejelasan Sasaran Anggaran (X₄)

Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Abdul Halim (2002). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan lima indicator variable, yaitu pusat tanggung jawab, perencanaan, bidang kegiatan, produk, dan tingkat pengembalian (Netty, 2011)

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X₅)

Variabel ketaatan pada peraturan perundangan diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan

hemat dan efisiensi, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan (Cefrida, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Deskriptif variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45	23,00	33,00	26,5333	1,97254
Kompetensi Aparatur Pemerintah	45	32,00	45,00	40,0000	3,46410
Pengendalian Akuntansi	45	28,00	39,00	34,2222	2,32466
Sistem Pelaporan	45	14,00	20,00	17,4222	1,40598
Kejelasan Sasaran Anggaran	45	16,00	25,00	21,4889	1,40813
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	45	10,00	15,00	12,5556	,96661
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat deskriptif statistik masing-masing instrumen dari sebanyak 45 responden yang diteliti. Untuk instrumen variabel akuntabilitas kinerja instansi memiliki nilai maksimum 33, minimum 23, nilai rata-rata 26,5333, dan standar deviasi 1,97254.

Kompetensi Aparatur memiliki nilai maksimum 45, minimum 32, nilai rata-rata 40,000, dan standar deviasi 3,46410.

Pengendalian Akuntansi memiliki nilai maksimum 39, minimum 28, nilai rata-rata 34,222, dan standar deviasi 2,32466.

Sistem Pelaporan memiliki nilai maksimum 20, minimum 14, nilai rata-rata 17,4222, dan standar deviasi 1,140598

Kejelasan Sasaran memiliki nilai maksimum 25, minimum 16, nilai rata-rata 21,4889, dan standar deviasi 1,40813

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan memiliki nilai maksimum 15, minimum 10, nilai rata-rata 12,5556, dan standar deviasi 0,96661.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk degree of freedom (df) = $n-2$ dengan α 0,05, n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df=64-2=62$, sehingga didapat r_{tabel} untuk df (62) = 0,308.

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data 2016, diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanyaan yang berjumlah 7 item pertanyaan untuk variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini dapat dikatakan valid. Kemudian berikutnya hasil uji validitas untuk variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah.

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah

Dari hasil pengolahan data 2016, diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanyaan yang berjumlah 10 item pertanyaan, untuk Kompetensi Aparatur Pemerintah variabel ini dapat dikatakan valid. Kemudian berikut-

nya hasil uji validitas untuk variabel Pengendalian Akuntansi

Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Akuntansi

Dari hasil pengolahan data 2016, diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanyaan yang berjumlah 8 item pertanyaan, untuk Pengendalian Akuntansi variabel ini dapat dikatakan valid. Kemudian berikutnya hasil uji validitas untuk variabel Sistem Pelaporan Kinerja.

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pelaporan Kinerja

Dari hasil pengolahan data SPSS, diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanyaan yang berjumlah 4 pertanyaan untuk variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah ini dapat dikatakan valid. Kemudian berikutnya hasil uji validitas untuk variabel Kejelasan Sasaran

Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran

Dari hasil pengolahan data SPSS, diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanyaan yang berjumlah 5 pertanyaan untuk variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah ini dapat dikatakan valid. Kemudian berikutnya hasil uji validitas untuk variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Hasil Uji Validitas Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Dari Hasil pengolahan data 2016, diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanya-

an yang berjumlah 3 item pertanyaan untuk variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan ini dapat dikatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Tanda	Nilai	Ket
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.621	>	0.6	Reliabel
Kompetensi Aparatur (X ₁)	0.845	>	0.6	Reliabel
Pengendalian Akuntansi(X ₂)	0.793	>	0.6	Reliabel
Sistem Pelaporan (X ₃)	0.761	>	0.6	Reliabel
Kejelasan Sasaran(X ₄)	0.705	>	0.6	Reliabel
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X ₅)	0.763	>	0.6	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2017

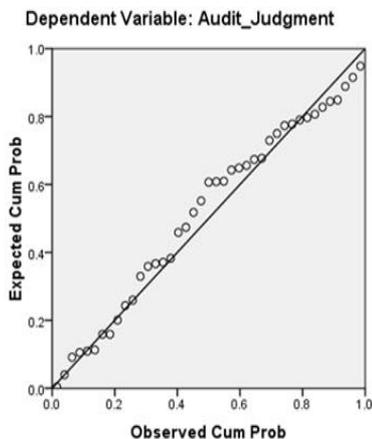
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel berada $> 0,6$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut reliabel dalam penelitian berada dalam kategori reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan alat uji statistik *normal probability plot* (normal P-P Plot). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal. Sebaliknya jika data tersebar jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini disajikan hasil uji statistik *normal probability plot*:

Gambar 2
Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan, 2017

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah data model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dengan mengamati besaran *Varians Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF > 10 atau nilai *Tolerance* < 0.10 maka terdapat multikolinearitas.

Tabel 2
Nilai Tolerance dan VIF
Coefficients^a

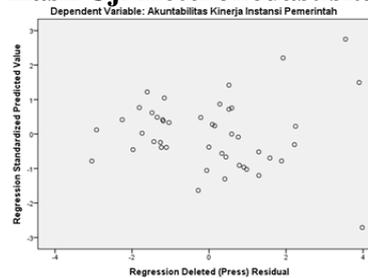
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi Aparatur Pemerintah	,548	1,824
Pengendalian Akuntansi	,413	2,419
Sistem Pelaporan	,702	1,425
Kejelasan Sasaran Anggaran	,752	1,329
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	,664	1,507

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Olahan, 2017

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan gambar 3 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar di atas dan di atas angka nol pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari *heteroskedastisitas*.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Pengujian Durbin-Watson
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,435

a. Predictors: (Constant), Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai D-W untuk kelima variabel independen sebesar 1,435. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model penelitian

ini hal ini dikarenakan nilai D-W berada di antara - 2 sampai + 2 yang artinya tidak ada autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisa data, menggunakan metode regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	6,023	4,188	
Kompetensi Aparatur Pemerintah	,221	,087	,388
Pengendalian Akuntansi	,400	,149	,472
Sistem Pelaporan	,414	,189	,295
Kejelasan Sasaran Anggaran	,489	,182	,349
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	,164	,283	,080

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari tabel 4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6.023 + 0.221X_1 + 0.400X_2 + 0.414X_3 + 0.489X_4 + 0.164X_5 + e$$

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X₁) dengan nilai t hitung 2.550 > t tabel 1.689 atau Sig sebesar 0.015 < 0.05 yang berarti H₁ ditolak dan H₀ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X₁) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Diterimanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi

akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah sehingga terwujudnya pertanggungjawaban yang memadai atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Variabel Pengendalian Akuntansi (X₂) dengan nilai t hitung 2.689 > t tabel 1.689 atau Sig sebesar 0.011 < 0.05 yang berarti H₂ diterima dan H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengendalian

Akuntansi (X₂) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berpengaruhnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian

akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Hery, 2009).

Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Variabel Sistem Pelaporan (X₃) dengan nilai t hitung 2.194 > t tabel 1.689 atau Sig sebesar 0.034 < 0.05 yang berarti H₃ diterima dan H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan

(X₃) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010).

Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₄) dengan nilai $t_{hitung} 2.683 > t_{tabel} 1.689$ atau Sig sebesar $0.011 < 0.05$ yang berarti H₄ diterima dan H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₄) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Beberapa peneliti berkaitan tentang kejelasan sasaran anggaran sering dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasilnya adalah bahwa anggaran dan kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *job-related attitudes* dan *budget-related attitudes* juga kepada kinerja.

Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X₅) dengan

nilai $t_{hitung} -0.580 < t_{tabel} 1.689$ atau Sig sebesar $0.565 > 0.05$ yang berarti H₅ diterima dan H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X₅) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tidak berpengaruhnya hasil penelitian ini bahwa untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan *reward system* dan *punishment* secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas, namun sistem reward dan punishment kurang konsisten dan format akuntabilitas yang selalu berubah-ubah membuat akuntabilitas tidak terlalu dipengaruhi oleh aturan yang telah dibuat.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen melalui persamaan regresi dari persentase. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,710 ^a	,504	,440	1,47586

a. Predictors: (Constant), Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2) diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.440 atau 44%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel Kompetensi Aparatur (X_1), Pengendalian Akuntansi (X_2), Sistem Pelaporan (X_3), Kejelasan Sasaran (X_4), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_5) memberikan sumbangan pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 44%, sedangkan sisanya sebesar 66 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X_1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diterimanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, keberhasilan pelaksanaantugas-tugas pemerintah umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi kelembagaan pemerintah daerah sehingga terwujudnya pertanggungjawaban yang memadai atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Variabel Pengendalian Akuntansi (X_2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berpengaruhnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan
3. Variabel Variabel Sistem Pelaporan (X_3) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.
4. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_4) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauhmana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas, dan dapat dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapainya.

5. Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan(X_5) Ketaatan Pada Peraturan Perundangan(X_5) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tidak berpengaruhnya hasil penelitian ini bahwa untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan *reward system* dan *punishment* secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas, namun sistem reward dan punishment kurang konsisten dan format akuntabilitas yang selalu berubah-ubah membuat akuntabilitas tidak terlalu dipengaruhi oleh aturan yang telah dibuat.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kekurangan yang terdapat penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, diantara adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya hendaknya menambahkan sampel penelitian atau diperluas pada sektor perusahaan lain dan

menambahkan periode pengamatan.

2. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data jika memungkinkan, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner. Penelitian berikutnya hendaknya memilih dan menerapkan kriteria sampel dengan lebih baik agar sampel penelitian mewakili populasi yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hilmi. 2005. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta)*. KOMPAK.No.13, Januari-April 2005Hal: 37-67.
- Indriani, Yulika Friska. 1993. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan

- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mayangsari, S.2003. *Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Pendapat Pendapat Audit*. Vol.6 No. 1
- Oktiandra, S. 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Soleman, Rusman. 2007. *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Disertasi, Unpad.
- Setiawan, Eko.2013.*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntabilitas dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (studi kabupaten Pelalawan)*. *Jurnal*.Pekanbaru: Universitas Riau
- Saputra, Hady Rinazta, 2010, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Studi pada SKPD Kuantan Singingi*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Setyantomo, Yohanes Yanuar. 2011. *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)*. Skripsi.Universitas Diponegoro.
- Suryani, Indra Dewi. 2010. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*.Skripsi. Universitas Diponegoro
- Watts, Ross L and Jerold L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. New York: Prentice-Hall Englewood.